

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Nahdlatul Ulama (NU)<sup>1</sup> merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Besarnya organisasi ini, dapat ditinjau dari jumlah anggotanya, cabang-cabangnya yang tersebar di penjuru daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara juga telah ada perwakilannya. Menurut survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2023, 56,9 persen orang Indonesia mengaku sebagai NU.<sup>2</sup> Survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga merilis bahwa ada sekitar 20 persen orang Indonesia yang mengaku menjadi anggota NU secara formal.<sup>3</sup> NU juga mempunyai 34 pengurus wilayah provinsi, 521 cabang kabupaten/kota, serta 31 cabang istimewa yang berada di luar negeri.<sup>4</sup> Selain itu,

---

<sup>1</sup> NU adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri beserta ulama tradisional Jawa lainnya, pada 26 Januari 1926 di Surabaya. lihat Katung Marijan, *Quo Vadis NU setelah Kembali ke Khittah 1926* (Surabaya: Erlangga, 1992), hlm. 1 Lihat juga Choirul Anam, *Pertumbuhan dan perkembangan NU* (Surabaya: Bisma Satu Press, 1998), hlm. 36

<sup>2</sup> Sindonews.com, "Survey Denny JA: Pendukung Nahdlatul Ulama Naik Drastis" diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1193773/15/survei-denny-ja-pendukung-nahdlatul-ulama-naik-drastis-1693901380> pada 10 Januari 2025 pkl 20.00 WIB

<sup>3</sup> SMRC mengemukakan data bahwa terdapat total 20 persen warga Indonesia yang mengaku sebagai anggota NU. Rinciannya, ada 8,6 persen mengaku anggota aktif dan 11,7 persen sebagai anggota tapi tak aktif. Survei ini dilakukan untuk mengetahui jumlah anggota, bukan orang yang mengaku sebagai warga NU. lihat NU Online, "Survei SMRC: 40 Juta Anggota NU Jadi Pemilih di Pilpres 2024" diakses melalui <https://www.nu.or.id/nasional/survei-smrc-40-juta-anggota-nu-jadi-pemilih-di-pilpres-2024-ugHiN> pada 10 Januari 2025 pkl 20.00 WIB

<sup>4</sup> Sebanyak 2.295 peserta mengikuti Mukhtamar NU pada tahun 2021 di Lampung berasal dari 34 PWNU, 521 PCNU, 31 PCINU, 14 Banom dan 18 Lembaga, lihat Sindonews.com, "Muktamar NU Ke-34 Diikuti 2.295 Peserta, Setiap Wilayah dan Cabang 3 Utusan" diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/593733/15/muktamar-nu-ke-34-diikuti-2295-peserta-setiap-wilayah-dancabang-3-utusan-1636416672> pada 10 Januari 2025 pkl 20.00 WIB

NU juga memiliki aset berupa rumah sakit, lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah serta perguruan tinggi, dan ratusan ribu hektare tanah dan bangunan, yang tersebar di Indonesia, khususnya di pulau Jawa.<sup>5</sup>

Kedekatan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah pada masa reformasi, merupakan salah satu faktor yang membuat organisasi ini menjadi besar dan kokoh. Ketika Jokowi menjabat sebagai presiden (2014-2024), NU mencatatkan rekor dengan jumlah kader terbanyak di kabinet dalam sejarahnya.<sup>6</sup> Pada periode keduanya (2019-2024), Jokowi juga didampingi oleh Kiyai Ma'ruf Amin yang pernah menjadi Rais Aam PBNU (2015-2018). Kader-kader NU juga menduduki jabatan penting di eksekutif, pemerintah daerah, BUMN, serta sektor korporasi.<sup>7</sup> Hal ini membuat NU memiliki akses istimewa ke dalam ruang-ruang kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, serta sokongan yang kuat dari pemerintah, NU semakin mudah dalam mengembangkan organisasi, memberdayakan jamaah, serta memperluas jangkauan organisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Radarnonstop.co, “Dari Duit Hingga Sekolah, Inilah Aset Milik NU” diakses melalui <https://m.radarnonstop.co/read/32399/Dari-Duit-Hingga-Sekolah-Inilah-Aset-Milik-NU> pada 10 Januari 2025 pkl 20.00 WIB

<sup>6</sup> Contoh kader NU yang menjabat sebagai Menteri pada masa Presiden Jokowi diantaranya: Lukman Hakim Saifudin (Menteri Agama), Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Imam Nahrawi (Menpora) Marwan Ja'far (Menteri Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), M Nasir (Menristekdikti), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama 2020-2024) dan lainnya.

<sup>7</sup> Contoh kader NU yang memperoleh posisi penting lainnya seperti Kiyai Said Aqil Sirad (Ketua Umum PBNU 2010-2021) sebagai komisaris PT KAI dan Kyai Yahya Cholil Staquf sebagai Dewan Pertimbangan Presiden.

<sup>8</sup> Greg Fealy, “Nahdlatul Ulama dan Jebakan Politik” diterjemahkan oleh Aziz Anwar dari “Nahdlatul Ulama and the politics trap” diakses melalui <https://crcs.ugm.ac.id/nahdlatul-ulama-dan-jebakan-politik/> pada 10 Januari pukul 21.00 WIB

Salah satu dampak dari relasi kekuasaan yang dimiliki NU dengan pemerintah pada masa reformasi yaitu terjadinya peningkatan pertumbuhan organisasi di wilayah-wilayah yang sulit berkembang sebelumnya, seperti Sumatera Barat. Pertumbuhan itu dapat dilihat dari kepengurusan cabang yang telah terbentuk di 19 daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, bahkan beberapa pengurus wakil cabang ditingkat kecamatan juga telah terbentuk. Selain itu, anak-anak muda Sumatera Barat juga menunjukkan minat yang tinggi untuk menjadi kader NU, ini dapat dilihat dari aktifnya banom-banom NU, seperti Gerakan Pemuda (GP) Anshor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), serta Fatayat (organisasi perempuan muda NU).<sup>9</sup>

NU Sumatera Barat telah melakukan berbagai aktivitas organisasi baik di tingkat wilayah hingga cabang, seperti pengkaderan, kegiatan keagamaan, pengelolaan ekonomi dan pendidikan. Pada bidang pengkaderan, telah dilakukan berbagai pengkaderan seperti Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU)<sup>10</sup> dan Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-KPNU),<sup>11</sup> yang merupakan salah satu gerbang untuk menjadi kader NU. Setiap pengurus cabang diwajibkan melakukan pengkaderan ini. Dalam bidang keagamaan juga

---

<sup>9</sup> Arsip PWNU Sumatera Barat, Uraian Pelaksanaan Program PWNU Sumatera Barat Masa Khidmat 2020-2025

<sup>10</sup> Salah satu pengkaderan MKNU yang dilakukan PWNU diadakan Asrama Haji Padang, pada 9-13 Agustus 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang

<sup>11</sup> Salah satu pengkaderan PD-KPNU diadakan di Asrama Haji Padang pada 2-4 Desember 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 66 orang

telah disemarakkan berbagai aktivitas keagamaan seperti pembacaan kitab kuning, *lailatul ijtima'*, serta pengajian-pengajian umum yang bertemakan Ahlussunnah Waljamaah dan penyebaran paham moderat. Dalam bidang ekonomi, telah diaktifkan lembaga pengelolaan zakat infak dan sedekah (Laziznu), melalui lembaga ini warga NU dapat membantu mereka yang membutuhkan. Dalam bidang pendidikan, terdapat lembaga pendidikan Ma'arif yang mengelola pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi, serta berdirinya berbagai pesantren yang dikelola oleh pengurus dan kader NU.<sup>12</sup> Selain itu, NU Sumatera Barat juga telah mendirikan perguruan tinggi yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, yang didirikan pada 17 Oktober 2014.<sup>13</sup> Universitas ini dapat dijadikan sebagai alternatif bagi warga Sumatera Barat untuk melanjutkan pendidikannya. Di bidang lainnya, seperti; kesenian, olahraga, beladiri, dakwah juga telah mulai menggeliat yang diwadahi oleh lembaga-lembaga NU, seperti; Pagar Nusa, LDNU, Lesbumi, Lakpesdam dan lainnya.<sup>14</sup> Berbagai aktivitas dan pencapaian ini menunjukkan NU di Sumatera Barat semakin berkembang dan tumbuh.

Berkembangnya NU di Sumatera Barat pada masa sekarang (2024), berbanding terbalik dengan yang terjadi pada masa silam, terutama masa sebelum

---

<sup>12</sup> Kegiatan-kegiatan diatas didakan secara rutin dari tahun 2020-2024 yang diadakan oleh pengurus PWNU di Padang, maupun pengurus cabang di daerahnya masing-masing sebagaimana terdapat dalam Arsip PWNU Sumatera Barat tentang uraian Pelaksanaan Program PWNU Sumatera Barat Masa Khidmat 2020-2025

<sup>13</sup> UNU Sumatera Barat beralamat di Jl. S. Parman No. 119 A Ulakkarang Padang

<sup>14</sup> Berbagai kegiatan diatas diadakakan oleh PWNU melalui lembaga-lembaganya di Padang dalam rentang waktu 2020-2024 sebagaimana terdapat dalam Arsip PWNU Sumatera Barat tentang uraian Pelaksanaan Program PWNU Sumatera Barat Masa Khidmat 2020-2025.

reformasi (1998). Meskipun Pengurus Wilayah telah terbentuk di Sumatera Tengah (Sumatera Barat) sejak 1953 pada masa Orde Lama, akan tetapi perkembangan NU berjalan lambat.<sup>15</sup> Tidak berkembangnya NU di Sumatera Barat pada masa itu, dapat dilihat dari kepengurusan yang tidak aktif, sedikitnya aktivitas organisasi yang dilakukan, serta minimnya catatan tertulis dan dokumen tentang NU yang ditinggalkan.<sup>16</sup>

Terkait jumlah anggota NU pada masa awal kedatangannya di Sumatera Barat, tidak dapat dipastikan jumlahnya karena belum adanya data tentang itu. Akan tetapi, kecilnya jumlah anggota dapat diperkirakan dari kurang diminati NU sebagai partai politik. Minimnya minat masyarakat Sumatera Barat itu dapat dilihat dari hasil pemilu 1955. Di tingkat lokal Sumatera Barat, NU hanya mampu memperoleh 1% suara atau sekitar 5.645 pemilih.<sup>17</sup> Sementara itu, di tingkat nasional, meskipun NU mampu meraih tiga besar dengan jumlah suara sebanyak 6.955.141 atau 18.41 % dan memperoleh 45 kursi, akan tetapi tidak ada perwakilan NU Sumatera Barat

---

<sup>15</sup> NU di Sumatera Barat (NU Sumatera Tengah) didirikan oleh beberapa pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang tidak puas dengan memakai satu mazhab saja. Mereka melakukan rapat di Bukittinggi dan sepakat untuk mendirikan NU (yang memakai empat mazhab) di Sumatera Barat. Peserta rapat itu terdiri dari Zarkawi, Abu Alma'riji, Saudi Jasief, Thaha Ma'ruf, A. Razak, Tuanku Tanah Air. Rapat yang bertempat di rumah Syaridi Syarif di Bukittinggi, akhirnya secara resmi membentuk pengurus NU pertama di Sumatera Barat, pada tanggal 4-5 Desember 1953, lihat Andri Ashadi, dkk, "Ayah Tiri: Dinamika Nahdlatul Ulama di Ranah Minang" Jurnal Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2, 2002, hlm. 139

<sup>16</sup> Wawancara dengan Firdaus (Sekretaris PWNu Sumatera Barat 2005-2010), di Padang, pada 1 September 2025

<sup>17</sup> Mestika Zed, dkk, *Sumatera Barat Di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 126

untuk DPR RI.<sup>18</sup> Menurut Gusti Asnan, NU di Sumatera Barat pada masa Orde Lama merupakan partai kecil dan terpinggirkan.<sup>19</sup>

Terkait kepengurusan, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh kepengurusan NU Sumatera Barat sebelum reformasi, seperti sering terjadinya kevakuman pengurus. Contohnya, pada tahun 1994, keluar Surat Keputusan (SK) karateker dari PBNU untuk menata ulang kembali NU Sumatera Barat yang telah vakum sejak 1991. Pada SK ini berisi perintah untuk melakukan konferensi wilayah (konferwil).<sup>20</sup> Permasalahan lain yang dialami NU Sumatera Barat, tidak berjalanya kaderisasi, kepengurusan NU dijabat oleh tokoh yang sama dalam jangka waktu yang panjang, seperti Abdul Aziz Shaleh Tuanku Mudo yang memimpin PWNU pada 1970-an dan Amiruddin yang memimpin PWNU pada 1980-an. Catatan lainnya menunjukkan, bahwa kepengurusan Badan Otonom NU, dijabat oleh keluarga Abdul Aziz Tuanku Mudo seperti ketua wilayah GP Anshor yang dijabat oleh putra-putranya, Mukhsin Aziz (1989-1994), dan Khusnun Aziz

---

<sup>18</sup> Langgam.id, “Kursi Sumatera Tengah Hasil Pemilu 1955 dan Perjalanan Pemilihan di Sumbar”, diakses melalui <https://langgam.id/kursi-sumatera-tengah-hasil-pemilu-1955-dan-perjalanan-pemilihan-di-sumbar/> pada tanggal 20 November 2024, Pkl. 10.00 WIB, lihat juga Mestika Zed, dkk, *Sumatera Barat Di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 127

<sup>19</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme : Sumatera Barat Tahun 1950-an* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 103

<sup>20</sup> Armaidit Tanjung, *Berkhidmat untuk NU di Ranah Minang 1994-2014*, (Padang Pariaman: Pustaka Artaz, 2019), hlm. 13

(1994-2004), dan putri-putrinya, Husna Aziz, Sitti Aziza Aziz dan Azizah Aziz menjadi pengurus PW Fatayat dan Muslimat NU Sumatera Barat.<sup>21</sup>

Ada beberapa penyebab lambatnya perkembangan NU di Sumatera Barat sebelum *reformasi*. *Pertama*, berkembang pesatnya Muhammadiyah di Sumatera Barat.<sup>22</sup> *Kedua*,<sup>23</sup> telah hadirnya organisasi yang berpaham sama, yaitu Perti, sebagai wadah berhimpunnya kaum Islam tradisional Minangkabau.<sup>24</sup> *Ketiga*, sebagian orang Minangkabau menganggap NU merupakan organisasi orang Jawa.<sup>25</sup> Terakhir, adanya represi kepada NU dari pemerintah Orde Baru.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Khusnun Aziz (Putra Buya Abdul Aziz), pada 1 Juli 2025, lihat juga Nilma Yola, “Organisasi Perempuan Tradisionalis ditengah Masyarakat Modernis (Fatayat NU di Sumatera Barat 1971-1999)”, Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban, Vol. 16. No. 1, Juni 2022

<sup>22</sup> Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang berpaham pembaruan dan modernis. Lahir tahun 1912 di Yogyakarta dan hadir di Sumatera Barat tahun 1925 dibawa oleh Haji Rasul. Dari Minangkabau kemudian Muhammadiyah menyebar ke seluruh Nusantara. Lihat Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Umminda, 1982), hlm. 183

<sup>23</sup> Andri Ashadi, dkk, “Ayah Tiri: Dinamika Nahdlatul Ulama di Ranah Minang” *Jurnal Potret Pemikiran*, Vol. 26, No. 2, 2002, hlm 138

<sup>24</sup> NU dan Perti sama-sama berpaham Ahlussunnah Wal Jamaah, NU dengan empat Mazhab : Syafii, Hambali, Hanafi, Maliki, sementara Perti hanya berpegang teguh pada mazhab Syafi'i

<sup>25</sup> Secara kultural NU lahir dan besar di Jawa dan anggotanya juga banyak berasal dari etnis Jawa sehingga menimbulkan kesan bahwa NU merupakan organisasi orang Jawa.

<sup>26</sup> Pada masa Orde Baru, di bawah kekuasaan presiden Suharto, NU yang merupakan organisasi besar, dan dianggap sebagai ancaman, ditekan dan dipinggirkan oleh pemerintah. Tekanan pertama yang dilakukan pemerintah yaitu meleburkan partai NU ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973. Dan pada tahun 1983, secara organisasi NU keluar dari PPP dan menyatakan diri kembali ke khittahnya, menjadi organisasi sosial keagamaan dan tidak terlibat dalam politik praktis. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, NU tidak memiliki sedikitpun ruang-ruang kekuasaan. Kader-kader NU tidak dilibatkan dalam pemerintahan, termasuk jabatan menteri agama yang sebelumnya dijabat oleh orang NU. Pada masa ini, juga terjadi ketegangan antara pimpinan NU dengan pemerintah. Beberapa tokohnya seperti KH. Bisri Syansuri dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sering mengkritik kebijakan-kebijakan presiden Suharto. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan tokoh-tokoh NU ini, membuat NU semakin dijauhi dan dipinggirkan, sehingga mereka semakin kesulitan untuk mengembangkan NU di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Lihat Martin van Bruinessen, *NU tradisi, relasi-relasi kuasa, wacana baru* ( Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm. 101, lihat juga Nurlira Goncing, “Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru”, *The Politics*:

Masa reformasi (1998) menandai titik balik bagi dinamika dan perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) di Sumatera Barat. Perubahan konfigurasi politik nasional pascareformasi tidak hanya membuka ruang kebebasan sipil yang lebih luas, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi internal dalam tubuh NU.<sup>27</sup> Salah satu perubahan yang dapat dicermati adalah berkurangnya secara perlahan unsur-unsur feodalisme dalam struktur kepemimpinan dan pola relasi organisasi NU, yang sebelumnya cenderung hirarkis. Pergeseran ini menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya budaya organisasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap perubahan sosial. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi tersebut. Di bawah kepemimpinannya, NU tidak hanya mengalami revitalisasi pemikiran keagamaan, tetapi juga pembaruan orientasi sosial dan politik organisasi. Gus Dur membuka ruang yang lebih luas bagi gagasan-gagasan kritis dari kalangan tradisional muda NU, yang selama ini terkungkung oleh pola berpikir konservatif dan otoritas simbolik pesantren.<sup>28</sup>

Kehadiran generasi muda ini menjadi motor penggerak perubahan, terutama dalam mendobrak kevakuman berpikir dan berkreasi yang sebelumnya dianggap

---

Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, hlm. 61, lihat juga NU Online, "Saat NU Jadi Oposisi Pemerintah Orde Baru", diakses melalui <https://nu.or.id/fragmen/saat-nu-jadi-oposisi-pemerintah-orde-baru-KRj33> pada 11 Januari pukul 20.00 WIB

<sup>27</sup> Ma'mun Murod Al-Barbasy, dkk, "Reformasi Sistem Politik Untuk Keberhasilan Reformasi Birokrasi," Jurnal Independen, Vol. 1, No 2. 2020, hlm. 76-85

<sup>28</sup> Lihat Firdaus Muhammad, "Dinamika Pemikiran dan Politik Nahdlatul Ulama," Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 9 No. 1, 2015, hlm. 57-76

tidak lazim, bahkan tabu, dalam tradisi pesantren yang sarat dengan kepatuhan. Transformasi karakter NU tersebut membawa implikasi penting bagi penerimaan NU di Sumatera Barat. Dalam konteks budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip egalitarianisme, musyawarah, dan rasional, model organisasi keagamaan yang bersifat feodal dan tertutup cenderung kurang mendapatkan penerimaan sosial.<sup>29</sup> Oleh karena itu, pergeseran NU menuju organisasi yang lebih egaliter dan inklusif menjadikannya semakin relevan dengan struktur sosial masyarakat Minangkabau. NU tidak lagi dipersepsikan sebagai organisasi keagamaan yang eksklusif dengan kultur Jawa, melainkan sebagai wadah yang adaptif terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Fenomena tentang perkembangan NU di Sumatera Barat pada masa reformasi ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Akan tetapi, kajian ini lebih difokuskan untuk mengungkapkan tokoh-tokoh yang pernah memimpin NU di Sumatera Barat masa reformasi.

Adapun tokoh-tokoh yang pernah menjadi ketua PWNU masa reformasi, diantaranya: *Pertama*, Kasli, Dt. Sinaro, akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Ia adalah seorang guru besar Ilmu pertanian (agronomi), menahkodai NU Sumatera Barat masa khidmat 1999-2004.<sup>30</sup> *Kedua*, Maidir Harun, akademisi dan rektor IAIN Imam Bonjol Padang (2001-2005), guru besar sejarah Islam, sejak muda telah menjadi aktivis NU dan menahkodai NU Sumatera Barat

---

<sup>29</sup> Lihat Undri, "Orang Minangkabau dan Budaya Berdemokrasi", Jurnal Suluah, Vol. 14, No. 18, 2014, hlm. 29-41

<sup>30</sup> Wawancara dengan Rainol (Putra Kasli) di Padang, pada 4 Juli 2025

masa khidmat 2005-2010.<sup>31</sup> *Ketiga*, Khusnun Aziz, merupakan putra Abdul Aziz Tuanku Shaleh (Ketua NU Sumatera Barat era 1970-an), memimpin NU Sumatera Barat pada 2010-2013. *Keempat*, Mazwar, seorang tokoh dengan latar belakang pegawai di Kementerian Agama, memimpin NU Sumatera Barat pada 2014-2018.<sup>32</sup> *Kelima*, Ganefri, seorang akademisi dan guru besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang sekaligus Rektor UNP (2016-2024), memimpin NU Sumatera Barat dua periode (2019-2024) dan (2025-2030).<sup>33</sup>

Dari lima orang tokoh yang pernah memimpin NU Sumatera Barat di atas, yang akan penulis kaji dalam penelitian ini hanya tiga orang tokoh. Tiga orang tokoh itu yaitu; **Kasli Dt Sinaro, Maidir Harun, Ganefri**. Dipilihnya tiga orang tokoh ini yaitu sesuai konsep prosopografi, yaitu memiliki benang merah (kesamaan) yang lebih banyak. Ketiga orang ini mempunyai latar belakang yang sama, yaitu akademisi yang bergelar akademik guru besar dari tiga perguruan tinggi yang berbeda, yaitu Unand, IAIN (UIN) Imam Bonjol dan UNP. Selain itu, ketiga tokoh di atas belum pernah dikaji oleh peneliti lainnya, sehingga kehidupan tiga tokoh ini, dalam memimpin NU Sumatera Barat menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kajian ini dikategorikan sebagai sebuah prosopografi, oleh

---

<sup>31</sup> Maidir Harun, “70 tahun Prof. Dr. Maidir Harun, Lika-Liku Kehidupan Anak Seorang Petani Lubuak Aluang,” (Ciputat:Sakata Cendikia, 2020), hlm.93

<sup>32</sup> lihat Armaid Tanjung, *Op.Cit*, hlm. 26-172,

<sup>33</sup> Langgam.id, “Mantan Rektor UNP Ganefri Kembali Pimpin NU Sumbar”, diakses melalui <https://langgam.id/mantan-rektor-unp-ganefri-kembali-pimpin-nu-sumbar/> pada 20 Januari pukul 22.00 WIB

karena itu penulis memberi judul dengan “**Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Di Sumatera Barat 1998-2024: Sebuah Kajian Prosopografi**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perspektif utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kepemimpinan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat, 1998-2024?”, ditinjau dari perspektif prosopografi. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, berikut dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Mengapa Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat sebelum masa reformasi (1998) tidak mengalami perkembangan yang berarti?
2. Bagaimana keterkaitan kepemimpinan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat periode 1998-2024 dengan tradisi kepemimpinan NU Pusat?
3. Bagaimana gaya kepemimpinan tiga akademisi, yaitu Kasli, Dt. Sinaro, Maidir Harun, dan Ganefri, yang pernah memimpin PWNU Sumatera Barat masa reformasi?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berusaha menjelaskan kepemimpinan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat pada masa reformasi dengan konsep prosopografi. Latar Belakang, karakteristik dan gaya kepemimpinan tiga ketua NU Sumatera Barat akan diungkap melalui penelitian ini. Oleh karena itu, dibutuhkan batasan spatial dan temporal. Adapun batasan penelitian ini secara spatial atau geografis yaitu wilayah provinsi Sumatera Barat. Secara temporal kajian ini memiliki batasan dari tahun 1998-2024.

Tahun 1998 dipilih karena pada tahun ini lahirnya reformasi dan awal mulainya menggeliat NU di Sumatera Barat. Sementara itu, tahun 2024 dipilih sebagai batasan akhir karena tahun ini menjadi tahun terakhir periode pertama kepemimpinan Ganefri, salah satu tokoh yang akan diteliti.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara rinci dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perkembangan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat sebelum masa reformasi (1998).
2. Untuk menjelaskan keterkaitan kepemimpinan tiga tokoh Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat periode 1998-2024 dengan tradisi kepemimpinan NU Pusat?
3. Untuk menjelaskan gaya kepemimpinan tiga akademisi yaitu Kasli, Dt. Sinaro, Maidir Harun dan Ganefri yang pernah memimpin NU Sumatera Barat masa reformasi.

Segala niat baik tentu akan mendatangkan hal yang baik pula. Begitu juga dalam penelitian ini. Diharapkan dapat mendatangkan manfaat, yaitu: bagi masyarakat Sumatera Barat dan warga NU, penelitian ini berguna sebagai informasi tentang sejarah Organisasi Keagamaan di Sumatera Barat, Tokoh NU serta kepemimpinan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat 1998-2024.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu tentang sejarah Nahdlatul Ulama telah banyak yang dilakukan dengan berbagai perspektif disiplin ilmu. Akan tetapi, yang membahas tentang Prosopografi tokoh NU Sumatera Barat masih minim. Untuk memperkuat argumen dalam penulisan tesis ini, diperlukan identifikasi sumber-sumber penelitian. Diantara penelitian itu ada yang berupa buku, tesis dan artikel jurnal. Diantara buku-buku yang akan menjadi literatur sekaligus sebagai pembanding, diantaranya:

*Pertama*, buku “Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967” karangan Greg Fealy. Buku ini menjelaskan tentang sikap NU yang sejak awal selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang telah lama dianutnya yaitu berdasarkan pada Fiqh Sunni klasik yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan pengikutnya. Oleh sebab itu, para elit NU selalu hati-hati dan memilih jalan tengah dalam bersikap. Jalan yang ditempuh NU ini selalu mengacu kepada pencapaian kemaslahatan dan menjauhi mudarat. Buku ini menjelaskan pemikiran dan perjuangan politik NU serta sikap politiknya pada masa Orde Lama, ketika Sukarno berkuasa hingga kejatuhannya tahun 1967.<sup>34</sup>

*Kedua*, buku “NU vis-a-vis Negara”, karangan Andree Feillard yang menjelaskan tentang interaksi umat Islam dan negara pada masa Orde Baru. Buku ini membongkar sejumlah stereotip Islam tradisional, dengan menunjukkan komitmen yang mendalam kelompok Islam tradisional terhadap nilai-nilai kebangsaan,

---

<sup>34</sup> Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKIS, 2003)

keterbukaan mereka terhadap pembaharuan sosial dan pendidikan serta mendalamnya dialog dengan kebudayaan lokal, terutama budaya Jawa. Buku ini dibagi ke dalam empat bagian kronologis. Bagian pertama melacak perkembangan NU sejak awal berdiri tahun 1926 hingga 1965. Bagian kedua membahas periode 1965-1973, yaitu ketika NU bekerjasama dengan ABRI melawan PKI, setelah terjadinya G 30 S. Bagian ketiga membahas hubungan NU dengan pemerintah (1973-1987), yang mengambil jalan oposisi dan kemudian keluar dari politik praktis dan kembali kepada khittahnya. Bagian terakhir membahas tentang peran NU dalam kehidupan keagamaan di Indonesia tahun 1987-1995.<sup>35</sup>

*Ketiga*, buku otobiografi Maidir Harun yang berjudul “ 70 tahun Prof. Dr. Maidir Harun, Lika Liku Kehidupan Anak Seorang Petani Lubuak Aluang”. Buku ini ditulis oleh Prof. Maidir Harun yang telah memasuki masa purnabakti sebagai guru besar di UIN Imam Bonjol Padang. Buku ini berisi tentang perjalanan hidupnya selama 70 tahun yang dimulai dari kehidupan masa kecil di kampungnya, di Lubuk Alung, kemudian masa sekolah di PGAN lalu menjadi mahasiswa di IAIN Imam Bonjol, Mesir dan Pascasarjana di IAIN Jakarta. Selanjutnya menjadi pegawai negeri dan menjadi dosen hingga rektor serta pejabat di kementerian Agama. Beberapa kegiatannya ketika menjadi aktivis NU juga dimuat dalam buku ini. Beberapa pandangan sejawat tentang dirinya juga terdapat dalam buku ini.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara*, (Yogyakarta: LKIS, Cet. 3, 2013), penerjemah: Lesmana

<sup>36</sup> Lihat Maidir Harun, *70 tahun Prof. Dr. Maidir Harun, Lika-Liku Kehidupan Anak Seorang Petani Lubuak Aluang*, (Ciputat: Sakata Cendikia, 2020)

*Keempat*, buku Armaidi Tanjung yang berjudul “Berkhidmat Untuk NU di Ranah Minang (1994-2014), buku ini berisi pengalaman, pandangan dan perjalanan penulisnya bersama NU dari tahun 1994 sampai tahun 2014. Buku ini ditulis dengan gaya wartawan yang dimulai dari perjalanan penulisnya ketika aktif di Anshor (Banom pemuda NU) pada 1994 hingga 2010 dan jadi pengurus PWNU Sumatera Barat pada 2010 hingga 2023. Beberapa informasi yang terkait NU Sumbar, dijelaskan dengan peristiwa yang detail. Kiprah dua orang tokoh yang penulis kaji (Kasli Dt. Sinaro dan Maidir Harun) dimuat dalam buku ini.<sup>37</sup>

*Kelima*, buku yang berjudul “Tokoh NU dari Sumatera Barat” yang ditulis Armaidi Tanjung, buku setebal 186 halaman ini berisi tentang riwayat hidup 17 tokoh NU Sumatera Barat yang sudah wafat, yang berkiprah di daerah dan pusat. Di antaranya adalah Abdul Aziz Sholeh Tuanku Mudo, Abdul Gani Latif, Abdul Razak Tuanku Mudo, Aisyah Dahlan, Amiruddin Datuk Adua Nan Basudu Ameh, Amril Am, Asrul Sani, Djamaludin Malik, Husni Kamil Manik, Mohammad Djamin, Muhammad Thoha Ma’ruf, Muhammad Zen Tuanku Bagindo, Saridan Syarif, Shaemory Wignjo Soebroto, Sj’aruddin Tani, Sjarkawi dan Usmar Ismail. Buku ini berisi pemikiran, kegiatan dan peristiwa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh NU itu.<sup>38</sup>

*Keenam*, buku yang berjudul “Prof. Ganefri, Tokoh Visioner Pembangunan

---

<sup>37</sup> Lihat Armaidi Tanjung, *Berkhidmat untuk NU di ranah Minang 1994-2014*, (Pariaman: Pustaka Artaz, 2017)

<sup>38</sup> Lihat Armaidi Tanjung, *Tokoh NU Dari Sumatera Barat*, (Pariaman: Pustaka Artaz, 2019)

Pendidikan, Catatan Kenangan dan Harapan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang” yang ditulis oleh Afdal dan Miftahul Fikri. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari seluruh pimpinan FIP UNP (Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, Ketua UPP, Kepala Laboratorium), tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga pendukung FIP UNP yang memiliki berbagai kenangan dan merasakan dampak kepemimpinan Prof. Ganefri. Berbagai kenangan yang dimaksud merupakan hasil pengalaman berintegrasi langsung maupun tidak langsung dengan Prof. Ganefri. Buku ini ditulis sebagai bentuk penghargaan tertulis terhadap semua jerih payah Prof. Ganefri dalam memikirkan dan memajukan UNP.<sup>39</sup>

Selain buku-buku diatas ada juga beberapa penelitian berupa thesis dan artikel yang akan menjadi rujukan, diantaranya, yakni:

*Pertama*, artikel yang berjudul “Pola kepemimpinan Kiyai Dalam Tubuh Nahdlatul Ulama (NU), yang ditulis oleh Ahmad Sugiri. Artikel ini menjelaskan tentang pola kepemimpinan Kiyai dalam tubuh NU yang mengadopsi dari kepemimpinan mereka di pesantren. Kiyai sebagai salah satu elemen yang sangat menentukan di pesantren, memiliki kharisma yang begitu besar bukan saja di kalangan para santrinya, tetapi menembus batas-batas desa dan daerah. Sebagai

---

<sup>39</sup> Lihat Afdal, Miftahul Fikri (ed), *Prof Ganefri: Tokoh Visioner Pembangunan Pendidikan*, (Padang: Sukabina Press, 2024)

akibatnya menjadi kelompok elite dalam struktur sosial masyarakat. Pola kepemimpinan kyai di pesantren ini berakar pada budaya kosmologi orang Jawa.<sup>40</sup>

*Kedua*, artikel yang berjudul “ Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama”, yang ditulis Wasito Raharjo Jati. Tulisan ini menjelaskan tentang relasi kuasa antara ulama dan pesantren dalam dinamika politik Nahdlatul Ulama. Keduanya tidak hanya elemen penting politik dan kultur NU, tetapi juga bagi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politiknya Nahdliyyin. Adanya konflik organisasi yang terjadi di PKB turut mempengaruhi dinamika NU sehingga menimbulkan adanya fragmentasi di antara ulama dan pesantren. Implikasinya, terjadi divergensi politik dan kultur antar para ulama dan pesantren dibasis wilayah NU yakni Jawa Tengah maupun Jawa Timur.<sup>41</sup>

*Ketiga*, artikel yang berjudul “Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia”, yang ditulis oleh Miftahul Ulum dan Abd. Wahid HS pada Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, September 2019. Penelitian ini berisi tentang NU sebagai institusi agama sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima’iyah, dimana sejak awal berdirinya telah menjadikan paham Ahlussunah Wal Jama’ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih. Dalam mengikuti empat mazhab fiqih

---

<sup>40</sup> Lihat Ahmad Sugiri, “ Pola Kepemimpinan Kyai Dalam Tubuh Nahdlatul Ulama (NU)”, *Jurnal AL-Qalam*, No. 68/XIII/1997

<sup>41</sup> Lihat Wasisto Raharjo Jati, “Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Ulul Albab*, Volume 13, No. 1, 2012

ini, menunjukkan, bahwa sejak berdirinya NU telah konsekuen bermazhab dalam upaya pengambilan hukum dengan mengambil referensi berupa kitab-kitab fiqih yang umumnya dikerangkakan secara sistematis.<sup>42</sup>

*Keempat*, artikel yang berjudul “Doktrin Kultural Politik NU”, yang ditulis oleh Ahmad Zainur dan Ainus Syifa pada jurnal *Al-Tsaqafa*, Vol. 18, No. 2, tahun 2021. Jurnal ini berisi tentang perjuangan NU dalam politik, dimana kerja politik itu telah dimulai sejak zaman sebelum kemerdekaan, dalam wadah MIAI, GAPI dan Masyumi. Doktrin politik NU ini bertumpu pada kanzah keilmuan fiqih yang menjadi landasan ilmu di dunia Islam dan pesantren. Keberadaan NU sebagai organisasi Islam sudah seharusnya memberikan partisipasinya untuk ruang politik, dengan beberapa doktrin-doktrin keagamaan yang dianutnya. Namun tujuan sebenarnya dari politik NU adalah untuk kemaslahatan umat dan bangsa.<sup>43</sup>

*Kelima*, artikel yang berjudul “Ayah Tiri: Dinamika Nahdlatul Ulama di Ranah Minang” yang ditulis oleh; Andri Ashadi, Wakidul Kohar, Muhammad Aqil, dan Danil Folandra. Artikel ini menjelaskan tentang penyebab tidak reaktif warga NU di Sumatera Barat dalam merespon gagasan Islam Nusantara. Penyebabnya: *Pertama*, adanya perbedaan kultur egaliter di Minang dengan kultur feodal di Jawa yang menyebabkan kurang terbentuknya kedekatan emosional dengan tokoh-tokoh NU di Jawa. *Kedua*; mayoritas warga NU di Minang baru terjun ke NU setelah

---

<sup>42</sup> Lihat Miftahul Ulum, Abd. Wahid HS, “Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia”, *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, 2019

<sup>43</sup> Lihat Ahmad Zainur, Ainus Syifa, “Doktrin Kultural Politik NU”. *Jurnal Al-Tsaqafa*, Vol. 18, No. 2, 2021

mendapatkan pendidikan baik itu di pesantren maupun di kampus-kampus di daerahnya. Namun, ditengah serangan terhadap NU, orang-orang NU Minang tetap mensosialisasikan nilai Islam Moderat yang akomodatif terhadap tradisi lokal kepada masyarakat.<sup>44</sup>

*Keenam*, artikel yang berjudul “Organisasi Perempuan Tradisionalis di tengah Masyarakat Modernis, (Fatayat NU di Sumatera Barat 1971-1999), yang ditulis oleh Nilma Yola. Artikel ini menjelaskan tentang perkembangan Fatayat NU di Sumatera Barat tahun 1971-1999. Organisasi ini awal masuk ke Sumatera Barat tahun 1971, dengan tujuan awal untuk melebarkan sayap NU di daerah. Periode pertama, Fatayat NU dipimpin oleh Ibu Khadijah Ismail namun mengalami kevakuman, dan mulai bergerak kembali ketika terbentuknya periode kedua masa Husna Aziz, dan mengalami kemunduran masa kepengurusan Siti Izzati Aziz.<sup>45</sup>

Beberapa tulisan di atas membahas tentang Nahdlatul Ulama, prosopografi dan kepemimpinan yang dimana temanya memiliki persamaan dengan kajian yang akan penulis teliti, sedangkan kajian tentang NU di Sumatera Barat belum banyak pembahasan yang berhubungan dengan ketokohan NU. Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskannya bagaimana kepemimpinan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat tahun 1998-2024 dengan konsep prosopografi, sejauh yang penulis ketahui, kajian ini belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya.

---

<sup>44</sup> Lihat Andri Ashadi, dkk, “Ayah Tiri: Dinamika Nahdlatul Ulama di Ranah Minang” *Jurnal Potret Pemikiran*, Vol. 26, No. 2, 2002

<sup>45</sup> Lihat juga Nilma Yola, “Organisasi Perempuan Tradisionalis ditengah Masyarakat Modernis (Fatayat NU di Sumatera Barat 1971-1999)”, *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, Vol. 16. No. 1, Juni 2022

## 1.6 Kerangka Analisis

Secara bahasa, prosopografi berasal dari kata “prosopon” (bahasa Yunani) yang berarti wajah atau secara harfiah berarti melihat. Kata prosopon dapat juga bermakna: *Pertama*, ciri-ciri wajah seseorang. *Kedua*, karakteristik individu eksternal (manusia, hewan, dan benda). Jadi secara harfiah, prosopografi adalah deskripsi karakteristik individu eksternal/material. Prosopografi sebagai sebuah metode merupakan pendekatan penelitian dengan upaya menyatukan semua data biografi yang relevan dari sekelompok orang secara sistematis dan stereotip. Dengan demikian, prosopografi merupakan sistem untuk mengatur data yang sebagian besar langka, sehingga data tersebut memperoleh makna tambahan dengan mengungkap hubungan dan pola yang mempengaruhi proses historis. Terkadang prosopografi hanya berguna sebagai bagian dari strategi penelitian yang lebih umum dan beragam yang memadukan berbagai teknik dan metode. Pada dasarnya, prosopografi merupakan teknik penelitian historis yang didasarkan pada analisis sistematis data biografi sekelompok pelaku sejarah terpilih.<sup>46</sup>

Kuntowijoyo menjelaskan prosopografi merupakan sebuah biografi kolektif terhadap tokoh-tokoh dalam satu kelompok atau sederajat. Prosopografi merupakan penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik latar belakang dari sekelompok aktor atau pelaku dalam sejarah yang ditulis melalui studi kolektif

---

<sup>46</sup> Koenraad Verboven, Myriam Carlier, Jan Dumolyn, *A Short Manual to the Art of Prosopography : Methods and Problems in Ancient History*, ( Brussels, 2007) hlm. 37-69

tentang kehidupan mereka. Latar belakang sekelompok pelaku sejarah itu meliputi zaman yang terdiri dari rentang waktu, abad dan tahun. Latar belakang ini meliputi persamaan pekerjaan, kedudukan, persamaan pemikiran, persamaan nasib, ekonomi dan peristiwa yang sama.<sup>47</sup>

Prosopografi bukan merupakan kumpulan biografi saja. Biografi, autobiografi, dan kumpulan biografi difokuskan pada individu dan semua detail kehidupan mereka. Subjek biografi memiliki minat pribadi langsung bagi para penulis biografinya. Sebaliknya, prosopografi bersifat impersonal, penulis prosopografi hanya tertarik pada individu sejauh mereka berhubungan dengan kelompok orang yang terhubung yang berbagi satu atau lebih karakteristik umum. Data biografi dikumpulkan tentang individu menurut (jika memungkinkan) daftar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (kusioner), dirumuskan dengan maksud analisis kelompok, bukan kompilasi potret kehidupan menyeluruh yang bulat.<sup>48</sup>

Lawrence Stone menjelaskan bahwa prosopografi merupakan penyelidikan karakteristik latar belakang umum dari sekelompok aktor dalam sejarah melalui studi kolektif tentang kehidupan mereka. Metode yang digunakan adalah mengajukan serangkaian pertanyaan seragam yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian, pernikahan dan keluarga, asal usul sosial dan posisi ekonomi yang diwariskan, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, agama dan sebagainya. Berbagai jenis informasi tentang individu-individu kemudian disandingkan dan digabungkan, dan

---

<sup>47</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm.212

<sup>48</sup>K.S.B, Keats-Rohan, *Prosopography Approaches and Applications: A Handbook*. (Oxford: Unit for Prosopographical Research, 2007), hlm. 16

diperiksa untuk variabel-variabel yang signifikan. Data-data yang ada kemudian diuji, baik untuk korelasi internal maupun untuk korelasi dengan bentuk-bentuk perilaku atau tindakan lainnya. Tujuan prosopografi adalah untuk memahami tindakan politik, untuk membantu menjelaskan perubahan ideologis atau budaya, untuk mengidentifikasi realitas sosial dan untuk menggambarkan dan menganalisis dengan tepat struktur masyarakat serta sifat gerakan didalamnya.<sup>49</sup>

Penulisan prosopografi dapat dibagi menggunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan elitis dan pendekatan massa. Pendekatan elitis adalah penulisan yang bertujuan untuk memahami kepribadian para tokoh, akar pembuatan dan keputusan, serta kepentingan dibalik sebuah retorika. Subjek penelitian biasanya adalah elit yang berkuasa. Teknik yang digunakan adalah melakukan penyelidikan yang sangat terperinci ke dalam silsilah, kepentingan bisnis, dan kegiatan politik kelompok, hubungan yang ditampilkan melalui studi kasus terperinci, yang hanya didukung oleh dasar statistik yang bersifat sekunder dan relatif kecil. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan kekuatan kohesif kelompok yang dimaksud, yang diikat bersama oleh darah, latar belakang, pendidikan, dan kepentingan ekonomi yang sama, belum lagi prasangka, cita-cita, dan ideologi. Pendekatan massa merupakan penulisan tentang kehidupan tokoh-tokoh yang tidak dikenal oleh banyak orang. Tujuan dari pendekatan massa untuk mengungkapkan perubahan sosial di dalam masyarakat seperti mobilitas sosial dan perubahan kultural. Teknik

---

<sup>49</sup> Lawrence Stone, "Prosopography" dalam *Historical Studies Today*, Winter, 1971, Vol. 100, No. 1, hlm. 47

yang digunakan dalam pendekatan massa ini yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan yang lebih luas dan lebih dangkal dibandingkan pendekatan elit.<sup>50</sup>

Kajian prosopografi yang akan penulis teliti ini, akan menggunakan pendekatan elitis yang berfokus membahas tentang kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok serta kemampuan mengarahkan tingkah lakunya untuk pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Setiap pemimpin harus memiliki keterampilan dalam memimpin, antara lain memiliki kelenturan budaya, keterampilan berkomunikasi, kreatif dan memiliki motivasi yang besar terhadap pengetahuan dan keterampilan.<sup>51</sup>

Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, ini berarti bahwa manajer akan dapat mencapai sasaran apabila dapat memimpin dan kemampuan memimpin merupakan pintu terhadap keefektifan pribadi maupun organisasi. Pemimpin adalah seorang yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan, pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin dan orang lain dengan kesadaran dan senang hati bersedia untuk mengikuti kehendak pimpinan itu.<sup>52</sup> Kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 48

<sup>51</sup> Kriastiadi, *Kepemimpinan* (Jakarta: LAN RI, 1996), hlm. 83

<sup>52</sup> Harbani, Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 5

lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu yang diharapkan. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki peran yang sangat besar dalam membangun hubungan antar individu dan pembentuk nilai organisasi yang dijadikan sebagai pondasi dasar bagi pencapaian tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan anggota bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Proses manajemen akan berjalan baik jika tipe, gaya, cara dan style kepemimpinan yang diterapkan pemimpinnya juga baik.<sup>53</sup>

Setiap kepemimpinan mempunyai gaya kepemimpinan tersendiri. Gaya kepemimpinan merupakan perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu: *Pertama*, hal-hal yang bersumber dari pimpinan meliputi latar belakang, pengetahuan dan pengalaman. *Kedua*, hal-hal yang bersumber dari bawahan meliputi kematangan, kebebasan bertindak, kemandirian, dan keinginan memperoleh wewenang dan tanggung jawab. *Ketiga*, hal-hal yang bersumber dari situasi lingkungan meliputi gaya yang lebih disukai kelompok kerja, sifat dari tugas, dan tekanan waktu.<sup>54</sup>

Beberapa gaya kepemimpinan itu diantaranya: *Pertama*, otoriter, yaitu pemimpin yang menentukan keputusan dan aturan, kemudian bawahan mengikuti

---

<sup>53</sup> Malayu s.p. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 200

<sup>54</sup> Sahlan Asnawi, "Semangat Kerja dan Gaya Kepemimpinan, *Jurnal Psikologi* 1999, No2, hlm. 87

arahan yang telah dibuat pimpinan itu. *Kedua*, demokratis/partisipatif, pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. *Ketiga*, *liassez-faire*/delegatif, pemimpin memberi kebebasan luas kepada bawahan untuk mengatur pekerjaan. *Keempat*, transformasional, pemimpin menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk melampaui target. *Kelima*, transaksional, pemimpin menekankan sistem reward dan punishment. Gaya kepemimpinan berarti menunjukkan “bagaimana” pemimpin menjalankan perannya, bukan hanya “apa” yang dikerjakannya.<sup>55</sup>

Prosopografi elit dalam kajian ini berhubungan dengan organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan adalah sekelompok orang yang memiliki doktrin, praktik, dan keyakinan agama yang serupa. Mereka dikelola oleh struktur organisasi yang memungkinkan mereka merencanakan acara dan mengelola keanggotaannya. Orang-orang yang bertugas menyelenggarakan ibadah, ritual, dan ajaran agama dalam organisasi ini biasanya dikelompokkan ke dalam hierarki kepemimpinan, yang dapat mencakup imam, pendeta, atau pemimpin agama lainnya. Selain itu, kelompok agama dapat melakukan kegiatan amal, sosial, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip agamanya.<sup>56</sup> Di antara organisasi keagamaan adalah organisasi keagamaan Islam.

Secara garis besar, organisasi keagamaan Islam dapat dibagi dalam dua tipologi, yaitu yang bersifat modernis dan bersifat tradisional. Islam modernis

---

<sup>55</sup> Ahmad Azmy, *Teori Dan Dasar Kepemimpinan*, (Makassar: Mitra Ilmu, 2021), hlm. 31

<sup>56</sup> Thomas F O’dea. *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: Rajawali. 1987), hlm. 227.

merupakan paham keagamaan yang mendukung sikap rasional, ilmiah, dinamis progresif dan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Gerakan Islam modernis muncul dalam rangka menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan zaman yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Kelompok ini juga berusaha mengembalikan ajaran Islam dengan menghilangkan segala bentuk tambahan yang datang kemudian, seperti merubah kebiasaan paham Islam tradisional yang bertentangan dengan syariat.<sup>57</sup> Di Indonesia, organisasi yang mewakili kelompok Islam modernis, diantaranya; Muhammadiyah dan Persatuan Islam.<sup>58</sup>

Islam tradisional merupakan paham keagamaan yang melestarikan nilai-nilai tradisi yang telah ada, dan akomodatif terhadap budaya lokal dan berbasis di pedesaan. Kelompok ini memiliki jaringan yang sangat kuat dan menyebar keseluruh pelosok melalui lembaga pendidikan seperti; pondok pesantren atau surau. Penyebaran mereka diawali dengan dengan masuknya Islam ke Indonesia di Aceh hingga kemudian menyebar keseluruh Nusantara.<sup>59</sup> Tradisionalis sebagai gerakan keagamaan baru muncul pada abad ke-20. Munculnya Islam tradisionalis merupakan reaksi dari perubahan sosial yang muncul akibat Islam modernis yang

---

<sup>57</sup> Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulantang, 1975), hlm. 9

<sup>58</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 91

<sup>59</sup> Asep Mulyaden, "Ideologi Islam Tradisionalis Dalam Tafsir", *Jurnal Iman dan Spritualitas*, Vol 1, No. 2021, hlm. 187

cenderung melupakan tradisi. Dalam konteks Indonesia organisasi yang mewakili kelompok ini, yaitu; Nahdlatul Ulama, Perti, Al-wasliyah.<sup>60</sup>

Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan yang berpaham Islam Tradisional yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri beserta ulama tradisional Jawa lainnya, pada 26 Januari 1926 di Surabaya.<sup>61</sup> NU tidak dapat dipisahkan dari tradisi pesantren, dengan tokoh kiyai (ulama) sebagai sentralnya. Pola kepemimpinan NU, mengadopsi pola dalam kepemimpinan dalam pesantren. Pengaruh dan wibawa kiyai yang sudah membudaya di pesantren sebagai basis NU, kemudian diaplikasikan secara formal dalam struktur kepengurusan NU. Tata kerja ini berakar pada tradisi pesantren yang menekankan sikap patuh dan tunduk pada kiyai.<sup>62</sup>

Dalam AD/ART NU, dijelaskan bahwa dalam kepemimpinan NU, terdapat dua badan kepengurusan, yaitu: *Pertama*, kepengurusan Syuriah yang merupakan lembaga tertinggi dan tugasnya seperti lembaga legislatif yaitu sebagai pengarah, pembina dan pengawas pelaksanaan keputusan-keputusan NU. Kepengurusan ini biasaya dijabat oleh ulama-ulama senior. *Kedua*, Kengurusan Tanfidziyah (pelaksana/ eksekutif). Tugas dari kepengurusan ini yaitu sebagai pelaksana

---

<sup>60</sup> Syamsuar Syam, "Tradisionanisme Islam, Suatu Karakter dan Pola Pengembangan Pola Islam di Indonesia", *Al-Hikmah-Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2018, hlm.20-30

<sup>61</sup> Choirul Anam, *Op.cit.*

<sup>62</sup> Ahmad Sugiri, *Op.cit.* hlm. 15-24

kegiatan-kegiatan NU. Badan Tanfidziyah ini tidak mempunyai hak untuk menolak keputusan yang telah diambil oleh kepengurusan Syuriah.<sup>63</sup>

Bila ditelusuri lebih jauh lagi, pola kepemimpinan NU ini berasal dari akar budaya Jawa. Dalam pikiran orang Jawa, kosmos terbagi dua, yaitu mikrokosmos (dunia manusia, dunia nyata), kedua makrokosmos (alam gaib), dan raja (pemimpin) dianggap sebagai penghubung diantara dua bentuk kosmos ini. Raja bahkan dianggap sebagai manifestasi ketuhanan, sehingga apa yang dikatakan raja, dipandang sebagai hukum yang harus dilaksanakan, karena dengan menjalankan perintah raja, sekaligus melaksanakan perintah Tuhan. Raja dalam konteks ini diletakkan dalam strata yang paling tinggi. Dari sini akhirnya terbentuk suatu karakter pola kepemimpinan dalam budaya Jawa yang berbentuk kepatuhan dan ketundukan rakyat kepada raja, (atau anggota terhadap pemimpinnya).<sup>64</sup>

Karakter kepemimpinan dalam budaya Jawa berbanding terbalik dengan karakter kepemimpinan dalam budaya Minangkabau (Sumatera Barat). Pemimpin di Minangkabau hanya” didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”, yang berarti, pemimpin tidak berjarak dengan yang dipimpinnya. Kepatuhan terhadap pemimpin bukan sesuatu yang mutlak, sewaktu-waktu pemimpin bisa disanggah dan dikritik apabila melakukan kesalahan, sesuai dengan falsafah adatnya “ raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah”. Pemimpin bukanlah strata yang paling

---

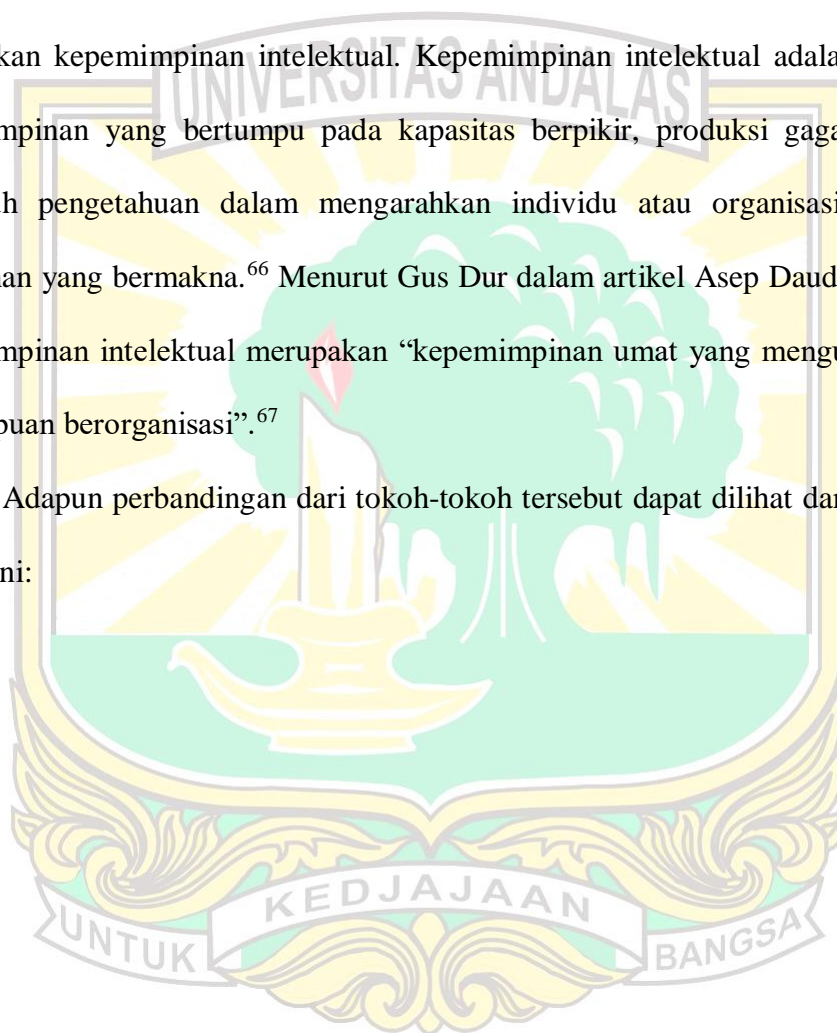
<sup>63</sup> PBNU, *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Mukhtamar Ke-34 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta Pusat: Sekretariat jenderal PBNU, 2022), hlm. 57

<sup>64</sup> Ahmad Sugiri, *Op.cit.* hlm. 15-24

tinggi di masyarakat Minangkabau, strata yang paling tinggi adalah kebenaran yang didapat melalui jalan musyawarah.<sup>65</sup>

Prosopografi tentang kepemimpinan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat akan mengkaji kehidupan tiga tokoh yang pernah menjadi Ketua Tanfidziah NU Sumatera Barat yang berlatar-belakang akademisi. Kepemimpinan akademisi merupakan kepemimpinan intelektual. Kepemimpinan intelektual adalah bentuk kepemimpinan yang bertumpu pada kapasitas berpikir, produksi gagasan, dan pengaruh pengetahuan dalam mengarahkan individu atau organisasi menuju perubahan yang bermakna.<sup>66</sup> Menurut Gus Dur dalam artikel Asep Daud Kosasih, kepemimpinan intelektual merupakan “kepemimpinan umat yang mengutamakan kemampuan berorganisasi”.<sup>67</sup>

Adapun perbandingan dari tokoh-tokoh tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:




---

<sup>65</sup> A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, (Jakarta, Pustaka Grafitipers, 1986), hlm.119

<sup>66</sup> Bernard M. Bass, *Leadership and Performance Beyond Expectations*, (USA: The Free Press), hlm. 14

<sup>67</sup> Asep Daud Kosasih, "Pola Kepemimpinan Muhammadiyah", *Jurnal Islamidina*, Vol. IX, No. 1, 2010



Pada tabel di atas, tertuju kepada kajian prosopografi, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini hanya tiga orang tokoh pemimpin PWNU Sumatera Barat yaitu; Prof. Kasli Dt. Sinaro, Prof. Maidir Harun Dt. Sinaro, dan Prof. Ganefri Dt. Junjungan Nan Bagadiang. Tiga orang tokoh ini memiliki benang merah/kesamaan yang lebih banyak. Di antara kesamaan itu; latar belakang sebagai pendidik, guru besar, mempunyai gelar adat dan memimpin NU di masa reformasi. Sementara itu, asal usul keluarga ketiga tokoh tersebut, Kasli berasal dari keluarga pedesaan (ayahnya Imam kampung, Maidir Harun berasal dari keluarga petani (ayahnya petani), dan Ganefri dari keluarga wiraswasta (ayahnya pedagang).

### **1.7 Metode Penelitian dan Bahan Sumber**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu upaya menyelidiki data riwayat hidup ketiga tokoh NU (Kasli Dt. Sinaro, Maidir Harun dan Ganefri) melalui: dokumentasi NU, arsip media lokal, publikasi internal dan wawancara. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan variabel sebagai berikut: tempat lahir, pendidikan, karir, jaringan keluarga, afiliasi politik dan peran dalam organisasi NU.<sup>68</sup> Data-data yang ada kemudian dikomparasikan sesuai periode yaitu: era reformasi, awal reformasi, pasca reformasi dan periode terkini.

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, pertama pengumpulan sumber-sumber/ data yang relevan dengan permasalahan (heuristik), kedua menyeleksi sumber-sumber

---

<sup>68</sup> Koenraad Verboven, Myriam Carlier, Jan Dumolyn, *A Short Manual to the Art of Prosopography : Methods and Problems in Ancient History*, ( Brussels, 2007) hlm. 37-69

yang didapat dari penelitian sejarah disebut kritik sumber (untuk mendapatkan fakta yang otentik dan kredibilitas), ketiga menginterpretasi (analisis-sintesis) dan keempat akhirnya penulisan sejarah. Dalam pembelajaran metodologi penelitian ilmu sejarah, sering dikenal dengan istilah historiografi. Historiografi dimaknai sebagai hasil atau karya dalam penulisan sejarah.<sup>69</sup>

Tahapan pertama adalah heuristik, yaitu tahap pengumpulan sumber sejarah, yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data berupa sumber primer, penulis lakukan di kantor PWNU Sumatera Barat, website Internet Archive dan NU Online, serta penyusunan arsip pada tokoh NU Sumatera Barat serta keluarga tokoh yang penulis teliti. Beberapa sumber primer yang penulis dapatkan diantaranya: *Pertama*, buku kenang-kenangan Muktamar Ke-XXII Partai Nahdlatul Ulama tahun 1959. *Kedua*, Surat Keputusan (SK) susunan kepengurusan PWNU Sumatera Barat (1999-2005), (2005-2010), (2010-2013) (2020-2025). *Ketiga*, Laporan pertanggungjawaban pengurus PWNU (1999-2005) dan (2005-2010). *Keempat*, uraian program kerja PWNU Sumatera Barat 2020-2025. *Kelima*, foto-foto tokoh yang dikaji dan lainnya.

Sumber primer berikutnya didapatkan melalui wawancara, suatu teknik yang digunakan dalam metode sejarah lisan. Alasan penulis menggunakan sejarah lisan untuk memperoleh kesaksian dari pelaku dan saksi yang terlibat, mengetahui, dan menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung terkait NU Sumatera

---

<sup>69</sup> Helius Sjamsudin, *Metode Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 13

Barat, serta tokoh yang diteliti.<sup>70</sup> Diantara wawancara itu dilakukan dengan Firdaus (Katib PWNU Sumbar 199-2005, Sekretaris PWNU Sumbar 2005-2010 dan 2014-2018), Zainal M.S (Wakil Ketua PWNU Sumbar 2005-2010, Ketua Syuriah PWNU Sumbar 2014-2018), Khusnun Aziz (Ketua PWNU Sumbar 2010-2013), Tan Gusli (Sekretaris PWNU Sumbar 2022-2030). Informasi yang diperoleh dari informan yaitu mengenai dinamika dan kebijakan PWNU masa reformasi. Dalam penulisan biografi tokoh, penulis melakukan wawancara diantaranya dengan Rainol (Putra Prof. Kasli Dt. Sinaro), informasi yang didapatkan berupa lika-liku kehidupan Prof. Kasli. Wawancara dengan Prof. Ganefri untuk memperoleh informasi tentang kehidupannya. Studi lapangan juga penulis lakukan dengan menelusuri asal usul tokoh tersebut ke Gadur, Pariaman dan ke Guguk VII Talago, Lima Puluh Kota, serta melakukan wawancara dengan keluarga tokoh yang diteliti.

Pengumpulan data berupa sumber sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka, sumber yang didapat terdiri dari buku dan artikel. Penyusunan ini dilakukan di ruang baca sejarah FIB Unand, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi, Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, dan website berita-berita online : langgam id, unp.ac.id dan lainnya.

Tahap kedua kritik sumber, dilakukan untuk melihat kebenaran sumber atau untuk mempertanyakan sumber, apakah sumber dapat dipercaya untuk digunakan. Kritik sumber terdiri dari dua tahap yaitu, kritik eksternal menitik beratkan pada

---

<sup>70</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogya: Tiara Wacana, 2003), hlm. 23

otensitas (keaslian) materi atau data, sumber dari permukaan atau dari luar untuk arsip kritik ini dilakukan untuk melihat jenis kertas yang digunakan atau dari sumber lisan digunakan untuk mengetahui kepribadian narasumber meliputi, watak maupun pendidikan. Kritik internal yaitu untuk mengetahui kebenaran dari yang disampaikan oleh data atau narasumber.<sup>71</sup>

Tahap ketiga, baru interpretasi yaitu menganalisis dan mengelompokkan data-data yang di dapat baik data berupa tulisan maupun dari hasil wawancara untuk diuji kebenarannya kemudian akan direkonstruksikan sehingga membentuk penjelasan sebagaimana topik yang akan ditulis.<sup>72</sup>

Tahap terakhir adalah historiografi atau tahap penulisan. Dalam tahap ini berisikan tentang hasil penelitian berupa tulisan berdasarkan fakta-fakta didalam sumber yang telah dianalisis dan diinterpretasikan. Pada tahap ini akan dilakukan perpaduan yang sistematis antar satu sumber dengan sumber lainnya.<sup>73</sup>

## 1.8 Sistemika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah untuk menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis,

---

<sup>71</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2011) hlm.44

<sup>72</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogya: Tiara Wacana, 2018), hlm. 78

<sup>73</sup> Louis Gotschalk, *Op.Cit*, hlm. 35

metode dan bahan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang perkembangan NU di Sumatera Barat sebelum tahun 1998-2024. Pada bab ini, akan dibahas keadaan sosial keagamaan Sumatera Barat awal abad ke-20 dan kehadiran NU pada tahun 1950-an. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang dinamika Nadhlatul Ulama di Sumatera Barat sebelum dan masa reformasi. Bagian akhir bab ini akan menjelaskan tentang Gusdur dan kepemimpinan NU di tingkat nasional.

Bab III membahas tentang kepemimpinan NU di Sumatera Barat pada masa reformasi tahun 1998-2024. Pada bab ini dibahas tentang riwayat hidup tiga tokoh NU yang pernah memimpin NU Sumatera Barat masa reformasi. Ketiga tokoh itu yaitu; Kasli, Dt. Sinaro, Maidir Harun, dan Ganefri. Dalam bab ini juga akan membahas tentang perkembangan NU pada masa kepemimpinan mereka. Bagian bab ini, juga menjelaskan gaya kepemimpinan tiga tokoh NU ini.

Bab IV membahas tentang dinamika sosial, budaya dan keagamaan NU Sumatera Barat masa reformasi (1998-2024). Bab ini akan membahas jaringan sosial keagamaan dan politik, peran sosial dan ekonomi, isu-isu strategis, dinamika internal, refleksi terhadap perubahan sosial, NU Sumatera Barat masa reformasi.

Bab V, merupakan bab terakhir yang merupakan bab penutup, pada bagian ini akan dipaparkan rangkuman hasil dari penelitian untuk menjawab masalah-masalah yang terdapat dalam rumusan masalah.